

## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukaniahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id BEKASI

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ / / DPMPTSP/VIII/2023

## Menimbang

- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI HAMNAH DARUSSALAM Nomor 014/SP,Rek/YAPIHASDA/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.02/423/II/2023 Tanggal 14 Februari 2023, Perihai Rekomendasi.

#### Berdasarkan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama PT/Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI HAMNAH DARUSSALAM

Nama Sekolah

SMP PLUS AL-BURHANIYAH

Alamat Sekolah

Kp. Burangkeng RT. 004/007 Desa Ciledug Kec, Setu Kab, Bekasi

Penanggung Jawab Yayasan Nomor Induk Berusaha (NIB) NPWP Yayasan

2102220003433

: GUNAWAN S. PD.I

63.281.500.7-413.000

Nama KBLI

Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kode KBLI

: 85122

Kualifikasi/Jenjang

Sekolah Menengah Pertama

Masa Berlaku

: 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

## Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

2 1 AUG 2023

A.n. BUPATI BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN AH PELAYAYAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

jama Muda 1208 198603 1 018

## Tembusan:

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- 3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

> Bekasi, 14 Februari 2023

Nomor

: DK-02.02/ 423 /II/2023

Sifat Lampiran : Penting

: 1 Berkas

Perihal

: REKOMENDASI

Kepada

Ketua Yayasan SITI HAMNAH DARUSSALAM

Di -

**Tempat** 

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 014/SP.Rek/SMP.AB/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP PLUS AL-BURHANIYAH serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 2102220003433 tanggal 21 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN SITI HAMNAH DARUSSALAM

b. Nama Sekolah c. Alamat Sekolah : SMP PLUS AL-BURHANIYAH : JI.MT.Haryono Desa Ciledug Kec.Setu Kab.Bekasi 17320

d. Nama Ketua Yayasan

: GUNAWAN, S.Pd.I

NPWP YAYASAN

: 63.281.500.7-413.000

Kep.Kemenkumham No.

: AHU-0003762.AH.01.04.Tahun 2022

g. Akta Pendirian Yayasan

- Nomor : 06

- Tanggal

: 08 Februari 2022

h. Nomor Induk Berusaha

: 2102220003433

Nama KLBI Kode KLBI

: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama . 85122

### Dengan Catatan:

- 1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
- 2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
- 3. Dapat menampung siswa lulusan SD/sederajat untuk mengikuti pendidikan;
- 4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
- 5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Tembusan:

Yth. Pj. Bupati Bekasi.

DEH.CARWINDA, M.Si Pembina Útama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001